

DOKUMEN RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Gambaran Umum dan Konsep Program PISEW

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan pengangguran telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan kegiatan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen Cipta Karya) sejak tahun 1970-an telah melakukan program pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. Hal ini diawali dengan Program Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa (P3D) yang bertujuan meningkatkan mutu rumah/perumahan serta prasarana dan sarana di kawasan perdesaan melalui metode pendekatan Tribina (bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha) dan mulai dilaksanakan metode “melatih sambil mengerjakan” (*on job training*) yang sekarang dikenal dengan “pemberdayaan masyarakat”.

Dari pendekatan P3D yang bersifat sektoral, berkembang dengan pendekatan holistik dan berdimensi kawasan menjadi Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu (P2LDT). Tahun 1980-an P2LDT dilanjutkan dengan pendekatan Pembangunan Permukiman Desa Pusat Pertumbuhan (P2DPP) yang kemudian berkembang lagi menjadi Program kawasan Terpilih Pembangunan Pusat Desa (KTP2D). Pendekatan KTP2D bertujuan mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan berdasarkan potensi unggulan di wilayah setempat. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan pada tahun 2002 mulai dilaksanakan bersama Kementerian Pertanian. Strategi yang digunakan adalah strategi mendorong sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah perdesaan. Seiring dengan pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsep ini juga dilaksanakan untuk Program Pengembangan Kawasan Minapolitan yang berfokus pada potensi perikanan.

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi, Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) dilaksanakan bersama Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi pada tahun 2010. Pada tahun 2007, Pemerintah melaksanakan kebijakan terpadu sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dalam “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”. PNPM-Mandiri dilaksanakan

melalui beberapa program yang dikelola oleh beberapa kementerian dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dengan pola padat karya.

Pelaksanaan PNPM-Mandiri dikoordinasi oleh Kemenko Kesra, dimana seluruh kecamatan di Indonesia mendapat dana dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam kegiatan PNPM-Mandiri, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program, yaitu:

1. PNPM-Mandiri Perkotaan;
2. PNPM-Mandiri *Rural Infrastructure Support* (RIS);
3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
4. PNPM-Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya bertindak sebagai lembaga pelaksana dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian Dalam Negeri membantu pelaksanaan program terutama dalam bidang sosialisasi, diseminasi, publikasi, kampanye program dan pelatihan atau penguatan kelembagaan.

1.1.2. Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan Program PISEW adalah meningkatkan pengembangan sosial ekonomi wilayah berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran kegiatan Program PISEW meliputi:

1. Terbangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan, yang dapat berupa:
 - a. Infrastruktur perhubungan/transportasi;
 - b. Infrastruktur pendukung produksi pertanian, peternakan dan perikanan, industri dan pariwisata;
 - c. Infrastruktur pendukung pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan industri;
 - d. Air minum dan sanitasi;
2. Peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan sosial dan ekonomi lokal antara lain komoditas unggulan serta potensi lokalnya;
3. Tersedia fasilitator masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan;
5. Pendayagunaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan.

1.1.3. Penerima Manfaat Program

Penerima manfaat dalam kegiatan Program PISEW adalah:

1. Masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan;
2. Masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
3. Masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun;
4. Pemerintah kabupaten dan kecamatan terkait.

1.1.4. Pendekatan Program

Dalam pelaksanaan kegiatan Program PISEW ada empat pendekatan yang dilakukan, yaitu:

1. Partisipatif Birokratis

Pendekatan partisipatif birokratis dilaksanakan pada tahap persiapan dengan mengikutsertakan aparatur pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam menyusun/menentukan desa berkembang (sentra produksi atau pengumpul bahan baku) sebagai pusat desa serta desa-desa penyangga untuk ditetapkan sebagai kawasan Program PISEW dalam satu kecamatan.

2. Partisipatif Teknokratis

Pendekatan partisipatif teknokratis dilaksanakan pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Fasilitator Masyarakat, Pokja Kecamatan dan Forum Kecamatan (perwakilan masyarakat) yang bersama-sama menyusun Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dengan hasil akhir merupakan Prioritas Rencana Infrastruktur Kawasan dengan besaran biayanya berupa DED dan RAB.

3. Teknokratis

Pendekatan teknokratis dilaksanakan pada saat pelaksanaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya menggunakan pola kontraktual antara PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) dengan Pihak Penyedia Jasa Konstruksi.

4. Birokratis

Pendekatan birokratis dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Serah Terima Aset Infrastruktur Terbangun untuk dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan.

1.2. LOKASI SASARAN PISEW

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Program PISEW dilakukan harmonisasi pada berbagai aspek dengan tujuan keterpaduan antar aspek tersebut, yang meliputi:

1.2.1. Penentuan Kecamatan Sasaran

Lokasi pelaksanaan kegiatan Program PISEW adalah kawasan permukiman di kecamatan yang ditetapkan oleh Menteri PUPR berdasarkan potensi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan;
2. merupakan kebijakan Pemerintah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi kawasan dan/atau menciptakan lapangan kerja;
3. sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
4. merupakan usulan Pemerintah Daerah.

1.2.2. Harmonisasi Kelembagaan

Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui penguatan kemampuan kelembagaan pemerintah kabupaten dan kecamatan yang tanggap terhadap persoalan pengembangan potensi kawasan yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peningkatan kerjasama antar desa membentuk Forum Kecamatan agar terlibat dalam proses perencanaan partisipatif.

1.2.3. Pendanaan

Harmonisasi pendanaan bertujuan agar penggunaan dana lebih efektif dan efisien serta pembiayaan kegiatan tidak tumpang tindih dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kegiatan PISEW dilaksanakan menggunakan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber perolehan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Setiap kecamatan menerima anggaran pembangunan konstruksi fisik dengan pagu sebesar Rp. 1,2 milyar per kecamatan yang bersumber dari APBN.

Mekanisme pengajuan pencairan dana oleh Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) akan diatur dalam kontrak antara pemberi pekerjaan dengan penyedia jasa dengan peraturan perundangan.

1.3. LOKASI SASARAN DI KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA

1.3.1. Kriteria Sasaran

Rangkaian kegiatan Program PISEW dilaksanakan dengan komponen yang meliputi: peningkatan kemampuan masyarakat, peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pelaku lokal serta pembangunan infrastruktur kawasan. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan untuk pengembangan kawasan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berorientasi pada pengembangan wilayah atau merupakan penghubung/koneksi antar wilayah.
2. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia dan tidak memerlukan biaya pembebasan lahan.
3. Memprioritaskan peningkatan/pengembangan komoditas unggulan dan diusulkan melalui forum kecamatan.
4. Teknologi tepat guna dengan memperhatikan nilai kearifan lokal.
5. Dilaksanakan dalam waktu yang singkat.
6. Mengutamakan penggunaan material setempat.
7. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial, dan budaya.
8. Tidak tumpang tindih dengan kegiatan APBD.
9. Terintegrasi dengan sistem infrastruktur yang ada.

1.3.2. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran Program PISEW Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pundong, Pleret dan Dlingo. Letak geografis (koordinat) kecamatan sasaran PISEW 2016 di Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1. Koordinat lokasi sasaran PISEW 2016 Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Koordinat		Dokumentasi Foto
		Garis lintang	Garis bujur	
1.	Pundong	-7.955783367	110.344299316	
2.	Pleret	-7.866691589	110.407791137	
3.	Dlingo	-7.934897422	110.465118408	

Sumber: Data Primer, 2016